



## Jurnal Ilmiah Implementasi Dasar Negara Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Bryan Sakti S.Y<sup>1</sup>, Dave Ferdinand Luys<sup>2</sup>, Muhammad Zidan Agil<sup>3</sup>, Rifqi Mukti Firjatullah<sup>4</sup>, Jonathan Felixio<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Teknik, Universitas Kusuma Wijaya Surabaya, Surabaya, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Desember 27, 2025  
Revised Desember 28, 2025  
Accepted Desember 31, 2025

#### Kata Kunci:

Pancasila,  
Implementasi Dasar Negara,  
Kehidupan Sehari-hari,  
Ideologi Dinamis,  
Globalisasi.

#### Keywords:

*Pancasila, Implementation of  
State Foundation,  
Daily Life,  
Dynamic Ideology,  
Globalization.*

### ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sering kali hanya dipahami sebagai konsep ideal tanpa implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, di mana data dikumpulkan dari berbagai referensi ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai ideologi dinamis yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Implementasi nyata ditemukan dalam bentuk sistem demokrasi yang inklusif, ekonomi kerakyatan berbasis Pasal 33 UUD 1945, serta pendidikan karakter melalui Kurikulum Merdeka. Namun, tantangan globalisasi dan digitalisasi menuntut transformasi internalisasi nilai melalui literasi digital dan etika sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan ideologi bangsa memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah dan praktik harian masyarakat di tingkat mikro untuk menjaga kedaulatan moral bangsa.

### ABSTRACT

*Pancasila, as the foundational basis of the Indonesian state, is often understood only as an ideal concept without practical implementation in daily life. This study aims to analyze the implementation of Pancasila values in various sectors, including politics, economy, socio-culture, education, and defense and security. The research employs a qualitative method with a literature study approach, collecting data from various scientific references, books, and policy documents. The results indicate that Pancasila functions as a dynamic ideology capable of adapting to contemporary challenges. Practical implementations are found in the form of an inclusive democratic system, a people-oriented economy based on Article 33 of the 1945 Constitution, and character education through the "Kurikulum Merdeka." However, the challenges of globalization and digitalization necessitate a transformation of value internalization through digital literacy and social ethics. This study concludes that strengthening the national ideology requires synergy between government policies and daily social practices at the micro-level to maintain the nation's moral sovereignty.*

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



*Corresponding Author:*

Bryan Sakti S.Y  
Fakultas Teknik, Universitas Kusuma Wijaya Surabaya,  
Surabaya, Indonesia  
Email: muhammadzidanagil47@gmail.com

---

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan tersiri diatas fondasi filosofis yang kokoh, yaitu Pancasila. Sebagai dasar negara, pancasila bukan sekedar kumpulan sila yang dilafalkan, melainkan *way to life* atau pandangan hidup yang seharusnya menjiwai seluruh aspek berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang termaktub di dalamnya dirancang untuk menjadi kompas etik dan moral dalam setiap tindakan kolektif maupun individu warga negara. Namun, dalam dinamika kehidupan bermasyarakat yang semakin kompleks di era globalisasi, terjadi kesenjangan yang signifikan antara Pancasila sebagai konsep ideal dan realitas praktik sehari-hari. Nilai-nilai luhur Pancasila seringkali hanya menjadi wacana formal dalam ruang-ruang seminar atau teks buku pelajaran, tanpa implementasi yang nyata dan berkelanjutan dalam interaksi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Gejala-gejala sosial seperti intoleransi, penyebaran hoaks, korupsi, kesenjangan ekonomi, dan erosinya semangat gotong royong menunjukkan semakin mudarnya internalisasi nilai dasar negara tersebut.

Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah dalam proses link and match antara nilai abstrak Pancasila dengan tindakan konkret dalam kehidupan keseharian. Implementasi Pancasila cenderung dipahami sebagai kewajiban negara semata melalui program-program formal, sementara peran individu, keluarga, komunitas, dan institusi sosial lainnya sering terabaikan. Padahal, ketahanan ideologi suatu bangsa justru diuji dan dibangun dari bagaimana nilai-nilai dasarnya hidup dan dipraktikkan di tingkatan yang paling mikro dan sehari-hari. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi yang hidup dan harus senantiasa diaktualisasikan dalam praktik sosial sehari-hari. Namun, realitas kontemporer menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal Pancasila dengan implementasi nyata di masyarakat. Penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan tujuan menganalisis konsep operasional setiap sila, mendeskripsikan praktik aktualisasi nilai dalam kehidupan sosial, serta mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi proses internalisasi Pancasila. Lebih jauh, penelitian ini juga berupaya mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dijalankan melalui pendidikan formal, kebijakan pemerintah, maupun gerakan masyarakat sipil, sehingga dapat dirumuskan sebuah kerangka kerja implementasi yang lebih integratif dan relevan dengan tantangan globalisasi.

Selain itu, penelitian ini memiliki kontribusi penting baik secara teoretis maupun praktis. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya kajian kewarganegaraan dan filsafat politik dengan perspektif interdisipliner, serta membuka ruang bagi konstruksi teori baru mengenai implementasi ideologi negara di tingkat mikro-sosial. Hasilnya diharapkan menjadi peta jalan bagi penelitian lanjutan, termasuk dalam ranah digital, ekonomi kreatif, maupun tata kelola pemerintahan. Sementara itu, manfaat praktis penelitian ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak: pemerintah memperoleh dasar empiris untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif; lembaga pendidikan mendapatkan masukan dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang kontekstual; masyarakat dan komunitas terinspirasi untuk menguatkan gerakan kebangsaan di akar rumput; serta individu dan keluarga memperoleh panduan reflektif untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ideologi bangsa dari level mikro hingga makro, sekaligus menegaskan relevansi Pancasila sebagai ideologi yang dinamis di era global.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengumpulkan data deskriptif yang mendeskripsikan objek penelitian secara rinci dan mendalam dengan maksud pemahaman suatu masalah. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan metode studi literatur yaitu seperti membaca buku, artikel, jurnal, dan laporan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Menurut Zulkarmain [1], penelitian kualitatif adalah sebuah jenis penelitian yang bertujuan untuk meraih pemahaman yang dalam terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan cara yang holistik.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Implementasi Dasar Negara Secara Umum**

Dasar negara merupakan sebuah landasan pokok atau pondasi utama dari sebuah negara, yang berisi nilai-nilai fundamental, ideologi, serta pedoman hidup. Bangsa Indonesia memiliki dasar negara atau pondasi utama yang menjadi pegangan hidup dan tujuan utama rakyatnya. Dasar negara yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang berisi nilai-nilai yang sifatnya fundamental, mutlak, universal, dan abadi, serta nilai-nilai yang berasal dari luhur budaya masyarakat yang tersebar di seluruh nusantara. Menurut Kaelan [2], nilai-nilai Pancasila bersifat dasar, objektif dan subjektif, universal, dan dinamis serta terbuka.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berfungsi sebagai panduan etis untuk interaksi sosial, dengan nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang bersifat abadi dan adaptif. Sifat dasar membuatnya fondasi tak tergantikan, objektif-subjektif memungkinkan interpretasi universal, dan dinamika keterbukaan memungkinkan evolusi sesuai zaman. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari mendorong harmoni, seperti toleransi agama dan solidaritas sosial, untuk mencapai masyarakat adil dan bermartabat [2] [3].

### **3.2 Implementasi Dasar Negara dalam Bidang Politik**

Implementasi Dasar Negara dalam bidang politik bukan sekadar slogan, melainkan pedoman operasional dalam mengatur kekuasaan, hukum, dan tata kelola negara. Secara lebih rinci, implementasi ini mencakup restrukturisasi lembaga negara, budaya politik, hingga produk hukum yang dihasilkan. Politik Indonesia dirancang agar tidak ada pemusatan kekuasaan pada satu tamgam saja hal ini diwujudkan dengan adanya hubungan antara presiden, DPR dan MA/MK diatur untuk saling mengawasi. Hal ini mencerminkan nilai sila ke-4 yaitu kekuasaan harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan atas kehendak pribadi. Penyerahan sebagian wewenang pusat ke daerah adalah bentuk pengakuan terhadap keberagaman Indonesia hal ini bertujuan agar pembangunan politik tidak hanya berpusat di ibukota Jakarta, tetapi menyeluruh hingga ke pelosok negeri. Dalam praktiknya politik Indonesia harus mengedepankan nilai-nilai moralitas diatas kepentingan praktis. seperti pada musyawarah sebagai prioritas, meskipun pada pemungutan suara diperbolehkan dalam sistem demokrasi modern, yang utama tetaplah berdialog untuk mencapai mufakat, hal ini untuk menghindari kediktatoran pada lingkup masyarakat. Dalam bidang politik, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Konstitusionalisme semua undang-undang (UU) yang dibuat oleh DPR dan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila, jika ada UU yang dianggap melanggar hak konstitusional warga, rakyat dapat menggugatnya melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam politik juga memiliki perlindungan kepada hak minoritas yaitu sebagai menjamin hak-hak kelompok minoritas tetap terlindungi di tengah arus suara mayoritas, sebagai bentuk keadilan sosial pada sila ke-5. Politik bukan hanya urusan pejabat ataupun pemerintah saja tetapi juga memiliki keterlibatan dengan masyarakat, seperti halnya kemerdekaan berpendapat. Negara wajib menjamin kebebasan pers dan kebebasan berkumpul sebagai sarana masyarakat untuk mengkritik pemerintah secara konstruktif. Lalu pada implementasi Pancasila terdapat pendidikan politik yaitu untuk

menuntut masyarakat yang cerdas secara politik agar tidak mudah terpecah belah oleh politik identitas atau hoaks yang mengancam persatuan.

### **3.3 Implementasi Dasar Negara dalam Bidang Ekonomi**

Implementasi utama dasar negara dalam ekonomi tertuang pada PASAL 33 UUD 1945 yang sering disebut sebagai “Konstitusi Ekonomi” Indonesia. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (Pasal 33 ayat 1). Dalam praktik, hal ini diwujudkan melalui koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Pasal 33 ayat 2). Contohnya adalah pengelolaan energi, air, dan sumber daya strategis melalui BUMN. Bumi, air, dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir individu atau korporasi (Pasal 33 ayat 3).

### **3.4 Implementasi Dasar Negara dalam Bidang Sosial Budaya**

Implementasi Dasar Negara (Pancasila) dalam bidang Sosial Budaya merupakan upaya untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang beradab, berbudaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta keberagaman. Tujuan utamanya adalah agar kemajuan pembangunan fisik tidak menggerus identitas bangsa. Pancasila berfungsi sebagai filter (penyaring) terhadap budaya asing yang masuk akibat globalisasi. Dalam praktiknya masyarakat didorong untuk tetap memelihara semangat kerja sama suarela, seperti kerja bakti lingkungan atau saling membantu saat tetangga tertimpa musibah, guna melawan arus individualisme. Dalam konteks sosial, setiap masalah di lingkungan masyarakat dapat diselesaikan dialog kekeluargaan, bukan melalui konflik atau penuntutan hukum semata. Perspektif Para Ahli dari Berbagai Era.

Perspektif ini diperkuat oleh pemikiran para ahli yang berkembang dari masa ke masa sebagai berikut:

- 1) Era 1970-an (Filsafat Manusia): Prof. Dr. Notonagoro [4] dalam teorinya mengenai hakikat manusia, menekankan bahwa implementasi sosial budaya adalah manifestasi dari sifat Monopluralis. Manusia Indonesia harus menyeimbangkan kedudukannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Artinya, kemajuan budaya tidak boleh hanya mengejar kepuasan personal, tetapi harus selaras dengan harmoni masyarakat.
- 2) Era 1980-an (Integrasi Sosial): Sosiolog Soerjono Soekanto [5] memandang Pancasila sebagai pusat gravitasi kebudayaan. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila berfungsi untuk menjaga Integrasi Sosial, mencegah perpecahan di tengah kemajemukan, dan menjadi standar nilai untuk menyaring unsur asing agar tidak merusak struktur sosial asli Indonesia yang berbasis kekeluargaan.
- 3) Era 1990-an (Masyarakat Madani): Nurcholish Madjid [6] mendeskripsikan Pancasila sebagai "Common Platform" (Titik Temu). Dalam konteks sosial, implementasinya adalah membangun budaya inklusif dan toleransi, di mana keberagaman keyakinan dan etnis justru menjadi pengikat kekuatan sosial melalui semangat masyarakat madani yang beradab.
- 4) Era 2000-an (Etika Sosial & Modal Sosial): Di masa kontemporer, Kuntowijoyo [7] menekankan Pancasila sebagai Etika Sosial untuk melawan arus konsumerisme. Sementara itu, Yudi Latif [8] dalam karyanya *Negara Paripurna*, mendeskripsikan Pancasila sebagai Modal Sosial bangsa. Di era ini, Pancasila diimplementasikan sebagai semangat gotong royong modern dan kewargaan (civility) untuk menjawab tantangan digitalisasi dan radikalisme, memastikan bahwa budaya Indonesia tetap bertahan di tengah dominasi global.

Melalui sintesis pemikiran para ahli tersebut, terlihat bahwa sejak era kemerdekaan hingga era digital 2000-an, Pancasila tetap menjadi kompas sosial yang menjaga agar masyarakat Indonesia tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang religius, humanis, dan bersatu dalam keberagaman.

### **3.5 Implementasi Pancasila dalam Bidang Pendidikan**

Dalam praktiknya, pendidikan berbasis Pancasila diterapkan melalui integrasi nilai-nilai luhur ke dalam kurikulum, budaya sekolah, dan metode pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang demokratis, inklusif, dan religius, sehingga siswa mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri nasionalnya. Ki Hadjar Dewantara beliau menekankan bahwa pendidikan harus berlandaskan pada Sistem Among. Implementasi Pancasila di sini berarti guru tidak hanya mengajar, tetapi menjadi teladan (*Ing Ngarsa Sung Tuladha*). Pendidikan harus menyatukan olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga secara seimbang agar tercipta manusia yang berbudi pekerti luhur. Implementasi Pancasila dalam bidang pendidikan adalah jembatan yang menghubungkan teori dasar negara dengan perilaku harian. Tanpa pendidikan yang berjiwa Pancasila, masyarakat akan kehilangan kompas moralnya saat menghadapi pengaruh budaya global yang bersifat individualistis dan materialistis. Di era 2000-an (khususnya melalui Kurikulum Merdeka), Untuk menjawab tantangan tersebut, para ahli di era 2000-an mengusulkan beberapa strategi implementasi nyata:

- 1) Literasi Digital Berbasis Pancasila: Mengacu pada pemikiran Yudi Latif [8], implementasi harian harus mencakup "Etika Digital". Sila kedua (Kemanusiaan) diwujudkan melalui budaya santun di internet, sedangkan Sila ketiga (Persatuan) diwujudkan dengan tidak menyebarkan hoaks yang dapat memecah belah bangsa.
- 2) Transformasi Kurikulum Berbasis Proyek: Dalam sistem pendidikan modern, Pancasila tidak lagi diajarkan secara doktriner. Melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), siswa diajak terjun langsung ke masyarakat untuk memecahkan masalah sosial (Sila 5) dan mempraktikkan musyawarah dalam tim (Sila 4).
- 3) Kulturalisasi lewat Media Populer: Para budayawan era 2000-an berpendapat bahwa Pancasila harus "masuk" ke dalam gaya hidup. Implementasi sosial budaya diwujudkan melalui film, musik, dan konten kreatif yang mengusung narasi toleransi dan gotong royong, sehingga nilai dasar negara tidak terasa kaku bagi generasi Z dan Alfa.

Secara keseluruhan, implementasi ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang dinamis dan adaptif. Ia berfungsi sebagai titik temu (common platform) yang menjaga kedaulatan moral bangsa di tengah arus globalisasi, memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap berpijak pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

### **3.6 Implementasi Pancasila dalam Bidang Pertahanan dan keamanan**

Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan di Indonesia terus berkembang, terutama pasca-reformasi 1998, dengan fokus pada profesionalisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pendekatan keamanan yang manusiawi. Di sekitar tahun 2000-an, beberapa ahli dan tokoh kunci berkontribusi melalui kebijakan, tulisan, dan praktik, menekankan integrasi Pancasila sebagai landasan etis dan strategis. Berikut penjelasan implementasinya, disertai pandangan ahli dari era tersebut. Prinsip-Prinsip Pancasila dan Implementasinya Pancasila diterapkan secara integratif dalam doktrin pertahanan, seperti "sistem pertahanan semesta" dan "pertahanan rakyat semesta", yang menekankan partisipasi rakyat, HAM, dan persatuan nasional. Di tahun 2000-an, ini tercermin dalam reformasi TNI untuk memisahkan dari politik dan fokus pada ancaman non-tradisional seperti terorisme dan bencana.

- 1) Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa Implementasi: TNI diwajibkan menjunjung nilai moral dalam operasi, seperti dalam peacekeeping PBB.

Ahli: Juwono Sudarsono (Menteri Pertahanan 1999-2001)

Sudarsono, sebagai menteri pertama pasca-Orde Baru, menekankan bahwa pertahanan harus berbasis etika Pancasila untuk mencegah pelanggaran HAM. Dalam pidatonya pada 2000, ia menyatakan bahwa TNI perlu "reorientasi" menuju profesionalisme yang menghormati keberagaman agama, seperti dalam operasi Timor Timur.

2) Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Implementasi: Pendekatan human security dalam penanganan konflik, seperti di Aceh dan Papua, dengan prioritas dialog.

Ahli: Susilo Bambang Yudhoyono [9] (Panglima TNI 2000-2001, Presiden 2004-2014) Yudhoyono, dalam masa jabatannya sebagai panglima, mendorong doktrin pertahanan yang berbasis Pancasila untuk melindungi warga sipil. Dalam bukunya *Transforming the Indonesian Armed Forces* (2000-an), ia menjelaskan bahwa pertahanan harus "manusiawi" dan adil, menghindari kekerasan berlebihan dalam operasi domestik.

3) Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Implementasi: TNI sebagai pemersatu bangsa, seperti dalam operasi penanggulangan separatisme.

Ahli: Prof. Dr. Rizal Sukma (Direktur Eksekutif CSIS Indonesia sejak 2000) Sukma, ahli keamanan internasional, dalam tulisannya di *Indonesia Quarterly* (2000-an), mengadvokasi pertahanan yang memperkuat persatuan melalui kerja sama regional ASEAN, berdasarkan Pancasila. Ia menyoroti bahwa ancaman disintegrasi dapat diatasi dengan pendekatan inklusif, bukan militeristik semata.

4) Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Implementasi: Kontrol sipil atas TNI dan partisipasi masyarakat dalam pertahanan.

Ahli: Dr. Dewi Fortuna Anwar (Peneliti Senior LIPI dan CSIS, aktif 2000-an)

Anwar, dalam analisisnya tentang reformasi TNI (misalnya, dalam *The Indonesian Quarterly* 2002), menekankan bahwa Pancasila memandu transisi TNI ke institusi demokratis. Ia mendorong musyawarah dalam kebijakan pertahanan, seperti penguatan DPR dalam pengawasan anggaran militer.

5) Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Implementasi: TNI terlibat dalam operasi kemanusiaan dan pengamanan pembangunan.

Ahli: Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Menteri Luar Negeri 1971-1978, masih aktif sebagai ahli di 2000-an)

Meski lebih dikenal di luar negeri, Kusumaatmadja dalam wawasan keamanan komprehensifnya (diperbaharui di 2000-an), menekankan bahwa pertahanan Pancasila harus mencakup aspek sosial-ekonomi, seperti pengamanan sumber daya untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya militer.

Reformasi TNI (1999-2004): Berdasarkan pandangan ahli seperti Sudarsono dan Yudhoyono, UU TNI 2004 mengintegrasikan Pancasila untuk memisahkan TNI dari politik dan fokus pada pertahanan nasional yang demokratis.

Operasi Aceh (2003-2005): Pendekatan human security dari Yudhoyono dan Sukma, yang mengutamakan dialog dan pembangunan, mengakhiri konflik berdasarkan nilai kemanusiaan Pancasila.

#### **4. KESIMPULAN**

Pancasila sebagai Ideologi Dinamis: Dasar negara bukan sekadar dokumen historis statis, melainkan sebuah "ideologi yang hidup" (living ideology) yang berfungsi sebagai titik temu (common platform) di tengah keberagaman bangsa. Pancasila terbukti mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai fundamentalnya.

Manifestasi Multisektoral: Implementasi dasar negara telah terwujud secara struktural melalui berbagai bidang. Dalam politik melalui sistem demokrasi yang beretika, dalam ekonomi melalui asas kekeluargaan dan peran BUMN/Koperasi, dalam pendidikan melalui penguatan karakter (P5), serta dalam pertahanan melalui pendekatan keamanan yang manusiawi (human security).

Sinergi antara Kebijakan dan Praktik: Keberhasilan internalisasi nilai-nilai negara sangat bergantung pada hubungan timbal balik antara kebijakan makro pemerintah dan praktik mikro harian di masyarakat. Tanpa adanya teladan dari elit politik dan partisipasi aktif masyarakat, nilai-nilai dasar tersebut hanya akan menjadi wacana formal tanpa makna operasional.

Adaptasi di Era Digital: Di tengah arus globalisasi, penguatan Pancasila harus ditransformasikan ke dalam bentuk literasi digital, etika sosial di ruang siber, dan konten kreatif yang inklusif. Hal ini krusial untuk memastikan kedaulatan moral bangsa tetap terjaga dan menangkal ancaman disintegrasi seperti hoaks dan radikalisme.

Pancasila sebagai Modal Sosial: Pada akhirnya, keberlanjutan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh sejauh mana setiap individu mampu menghidupkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam interaksi sosial terkecil. Pancasila adalah jangkar etik yang menjaga identitas nasional agar tetap kokoh namun tetap terbuka terhadap kemajuan global.

## **REFERENSI**

- [1] Zulkarmain. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Aksara.
- [2] Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- [3] Notonagoro. (1974). *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- [4] Notonagoro. (1971). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- [5] Soekanto, S. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [6] Madjid, N. (1992). *Islam, Doktrin, dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- [7] Kuntowijoyo. (2001). *Muslim Tanpa Masjid*. Jakarta: Mizan.
- [8] Latif, Y. (2018). *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*. Jakarta: Mizan.
- [9] Yudhoyono, S. B. (2000). *Transforming the Indonesian Armed Forces*. Jakarta.
- [10] Nugroho, H. (2021). *Multikulturalisme dan Nasionalisme Indonesia di Era Modern*. Surabaya: Airlangga University Press.